

UPDATE INFORMASI COVID-19 INDONESIA

Kasus Positif

95,418

+ 1,761

Sembuh

53,945

+ 1,781

Meninggal

4,665

+ 89

Seluruh

Positif 15

Sembuh 9

Meninggal

TERAKHIR UPDATE : 24 JULY 2020, 15:53 WIB

Maria Dikonfrontasi dengan AHW • Ombudsman Perlu Perkuat Mediasi dan Rekonsiliasi • Anggota PPSU Jakut Tewas Ditabrak • Swasta Diminta Legawa Bangun Jakarta • Banyar

Jumat 04 Oktober 2019, 11:00 WIB

Legislator Bukan Keranjang Sampah

Atang Irawan, Pengamat Hukum Universitas Pasundan Bandung | Opini



Istimewa

Atang Irawan, Pengamat Hukum Universitas Pasundan Bandung

MOMENTUM unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) yang dihasilkan pada akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019 harus menjadi catatan penting bagi legislator yang baru saja dilantik, bahwa perumusan UU jangan hanya mengedepankan kejar setoran.

Pertimbangan memenuhi target (kejar setoran) dapat berakibat pada overdosis yang diakibatkan kecanduan terhadap pembentukan UU atau karena kelalaian. Sehingga dalam akhir masa jabatan terkesan DPR sebagai keranjang sampah yang harus menetapkan UU sebanyak-banyaknya.

Bahkan setelah ditetapkan sebagai UU harus berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak sedikit juga membatalkan UU, jika memperhatikan efektivitas pembentukan UU dapat dikatakan jauh dari ekspektasi Prolegnas 2015-2019. Faktanya dari 189 RUU dan 37 RUU kumulatif terbuka hanya dapat diselesaikan tidak lebih dari 40%.

Pergeseran kekuasaan pembentuk UU dalam amendemen UUD 1945 dari Presiden ke DPR (*origin function*) harus dibaca sebagai penguatan prinsip daulat rakyat dalam rangka fungsi keterwakilan.

Itu dilakukan dengan harapan terjadi simbiosis-mutualis antara wakil dan yang terwakili melalui kanal partisipasi dalam proses mengakomodasi aspirasi rakyat. Namun tidak melulu

Berita Terkini

Polisi Sebut Editor Metro TV Yodi Bunuh Diri

MEGAPOLITAN

Direktur Reserse Kriminal Umum PMJ Kombe: Tubagus Ade Hidayat menjelaskan Yodi tertangkap kamera pengawas...

Sabtu 25 Juli 2020, 11:22 WIB

AS-Indonesia Tanda Tangani Ker Pembangunan

INTERNASIONAL

Kerja sama pembangunan bilateral dengan ni hingga 650 juta dolar AS untuk jangka lima...

Sabtu 25 Juli 2020, 11:12 WIB

Satu Pasien Positif Covid-19 Kabu Wisma Atlet

MEGAPOLITAN

Pria yang bekerja sebagai wiraswasta tersebut diketahui positif korona dari hasil swab test. I masuk dalam...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:53 WIB

Yogyakarta Punya Program Guru Masalah Belajar Daring

HUMANIORA

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan permasalahan dalam kegiatan belajar via daring yang...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:42 WIB

Sumut Mulai Rutin Ekspor Wortu Dunia

NUSANTARA

Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belaw Hasrul mengatakan pihaknya mencatat sepanjang semester I/2020,...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:21 WIB

Warga Sorong Palang Jalan Akibat Berulang

NUSANTARA

Sejumlah warga beramai-ramai memalang jal dengan kayu. Akibatnya, jalan dari Melati Ray menuju Kota Sorong...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:08 WIB

Anies Paparkan Angka Positivity Sentuh 5,9 Persen

MEGAPOLITAN



Idealnya seperti itu. Namun dalam kenyataannya justru sebaliknya. Banyak RUU yang memiliki relasi kuat (*close engagement*) dengan tercerabutnya pemenuhan hak konstitusional rakyat. Sehingga tidak sedikit UU yang dianggap tidak ada korelasi yang kuat antara UU dan kepentingan rakyat (*mismatch between law and society*).

Gagal fokus program legislasi nasional juga dapat ditunjukkan dengan ratusan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan UU.

Jika diperhatikan pembatalan UU tersebut bermuara pada lemahnya harmonisasi dan sinkronisasi dalam perumusan UU. Banyak terjadi bertentangan/tidak berkesesuaian antara UU dan UUD 1945, sehingga terkesan legislator hanya berkewajiban membentuk UU dan selanjutnya terserah MK. Padahal perumusan UU menyedot anggaran yang tidak sedikit.

Untuk diketahui, tidak kurang dari Rp4 miliar dalam setiap pembahasan 1 (satu) RUU. Yang lebih miris adalah prolegnas hanya menjadi 'daftar' RUU yang akan dibahas (wishlist). Bukan program yang diarahkan untuk kepentingan rakyat dan/atau pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Karena itu bukan hal aneh jika terjadi tumpang tindih atau benturan di antara RUU yang akhirnya menimbulkan kekacauan materi (chaos text). Pemikiran bahwa setiap persoalan harus diselesaikan dengan membentuk UU harus mulai dihilangkan untuk menghindari kecanduan perumusan UU.

Faktanya daftar RUU yang banyak dalam prolegnas tidak dapat diselesaikan secara maksimal.

Legislator baru telah dilantik. Dari 575 anggota, sebanyak 286 orang atau 49,74 persen merupakan non-petahana. Sebanyak 289 anggota atau 50,26 persen merupakan petahana. Dari komposisi itu yang berlatar belakang hukum hanya 80 anggota atau sekitar 14,28 persen.

Semoga dengan komposisi seperti itu membawa harapan baru yang meletakkan pembentukan UU. Bukan sekadar urusan mekanisasi yang tidak hanya bertumpu pada berapa banyak UU yang ditetapkan, tetapi lebih menggunakan kebijakan politik legislasi dengan mengedepankan untuk kepentingan rakyat dan pencapaian target pembangunan nasional.

Berkaca dari pembentukan UU dengan berbagai macam kelemahan, maka sebaiknya dalam rangka menciptakan UU yang lebih baik (good norm), dengan proses yang baik melalui partisipasi masyarakat (good process). Sehingga menciptakan koherensi antara UU dan kepentingan rakyat. Maka langkah yang harus dilakukan adalah, pertama, legislator segera melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap UU yang ada dianggap bertentangan dengan UUD 1945 atau kepentingan rakyat dalam rangka menghadapi tantangan zaman. Meskipun harus disadari bahwa hukum selalu tertatih-tatih mengejar perubahan zaman (het recht hink achter de feiten aan). Karena itulah pentingnya dirumuskan oleh prolegnas.

Kedua, menciptakan hukum yang responsif melalui perumusan UU dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk-bentuk yang modern, tidak konvensional. Sehingga tidak cukup hanya melalui FGD atau seminar, tetapi harus disosialisasikan oleh legislator. Salah satunya adalah pada saat mengadakan reses dan/atau kunjungan kerja serta kunjungan ke dapil.

Ketiga, dalam rangka upaya preventif agar tidak mengakibatkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional rakyat, maka pengujian tidak hanya melalui mekanisme judicial review post facto UU terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Namun perlu juga dipikirkan tentang bagaimana melakukan pengujian atau penelaahan terhadap RUU (preventif) ex ante review.

Dengan begitu RUU sebelum disepakati bersama dilakukan penelaahan atau pengujian untuk melihat terjadi disharmoni atau tidak dengan UUD 1945.

Keempat, harus memprioritaskan RUU perlindungan terhadap hak-hak konstitusional rakyat, atau minimal proporsional dengan RUU paket politik dan/atau kepentingan investasi. Dengan begitu dalam proses perumusannya formulasi RUU paket politik, investasi dan kepentingan rakyat dapat berbanding lurus. Ini menjadi penting karena dalam praktiknya selalu saja RUU yang terkait dengan kepentingan rakyat harus menyesuaikan dengan UU lainnya, sehingga tidak jarang hak-hak rakyat tergerus oleh kepentingan lain.



TAGS: # Opini

Sabtu 25 Juli 2020, 09:49 WIB

Guru Besar Warmadewa Sebut R Batasi Izin TKA

EKONOMI

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Johannes Ibrahim Kosasih mengatakan akses TKA dibatasi...

Sabtu 25 Juli 2020, 09:33 WIB

Selengkapnya

Top Tags

- # Babel
- # Jokowi
- # Anies Baswedan
- # an
- # PSBB

BenihBaik.com

Telkomsel-Benihbaik Beri Donasi Medis dan Pesantren

HUMANIORA

Mengawali bantuan perdana ke pesantren, Telkomsel mengandeng benih baik menyalurk donasi untuk pembangunan...

Rabu 15 Juli 2020, 14:10 WIB

Kimia Farma Sumbang Rp1 Milia

HUMANIORA

Sumbangan itu melalui BenihBaik.com, untuk pengadaan 20 sleeping pods bagi tenaga medi yang tidak bisa...

Selasa 14 Juli 2020, 14:10 WIB

Media Group Kembali Salurkan Nakes

HUMANIORA

Bantuan APD berasal dari Asosiasi Asuransi Ji Indonesia (AAJI) melalui...

Kamis 02 Juli 2020, 13:37 WIB

AAJI Sumbang Rp1 M untuk RS Ri 19 via BenihBaik.com

HUMANIORA

"Inisiatif AAJI kali ini, yaitu "Bersama Kita Bis yang diikuti oleh seluruh perusahaan...

Selasa 23 Juni 2020, 11:10 WIB

Benih Baik Hadapi Gelap dengan

HUMANIORA

PANDEMI covid-19 tidak hanya berdampak pa sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi dan...

Selasa 12 Mei 2020, 07:25 WIB

Selengkapnya

Berita Populer

Saat Olah TKP, Wajah Kekasih Yc Disorot Warga

MEGAPOLITAN

Vina, 20, salah satu warga yang ditemui saat pengecekan ulang TKP, di Jakarta, Senin (20/7) mengaku pernah...

Senin 20 Juli 2020, 23:37 WIB

Pelaku Pembunuhan Yodi Prabou

MEGAPOLITAN



RUBRIKASI

OPINI

Editorial

Podium

Kolom Pakar

EKONOMI

Politik dan

Hukum

HUMANIORA

Nusantara

OLAHRAGA

Sepak Bola

Otomotif

WEEKEND

Megapolitan

VIDEO

Foto

Infografis

Berita
Marcom
Publishing
Rss

Tentang
Beriklan
Contact
Karir
Pedoman Media Siber

IKUTI KAMI DI

Youtube
Facebook
Twitter
Contact Info

INFORMASI

Phone: 021 582 1303
Fax: 021 582 0476
Email: cs@mediaindonesia.com
marketing.onlinedigital@mi.

Add a comment...

Facebook Comments plugin

Baca Juga



Naik Kelas di Tengah Wabah

Margana Wiratma Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, Universitas Bina Nusantara, Jakarta Sabtu 25 Juli 2020, 04:00 WIB

Sebelum didera pandemi covid-19, GNI per kapita 2019 sebesar US\$4.050 mengalami kenaikan dari US\$3.840 pada...



Revitalisasi Perdesaan di Masa Pandemi

Wahyu Susilo Direktur Eksekutif Migrant Care Sabtu 25 Juli 2020, 03:55 WIB

Hingga akhir 2020 arus kepulangan pekerja migran Indonesia akan terus mengalir memenuhi kampung halaman, yang sebagian besar kawasan...



Mau Menulis Opini di mediaindonesia.com? Ini Syaratnya

Jumat 24 Juli 2020, 13:50 WIB

Bagi pembaca yang hendak berpartisipasi dalam kolom Opini di www.mediaindonesia.com bisa disampaikan melalui email...

Sabtu 25 Juli 2020, 07:39 WIB

Polisi Sebut Dua Pria yang Berjal Yodi bukan Pelaku

MEGAPOLITAN

Polisi menyebut kedua pria itu hanya orang lewat saja. Kedua pria itu dilihat oleh saksi sedang berjalan kaki...

Jumat 24 Juli 2020, 08:17 WIB

CCTV Menunjukkan Waktu Yodi l

MEGAPOLITAN

Dugaan waktu kematian Yodi juga dikuatkan oleh keterangan saksi mulai dari teman kerja Yodi di kantor dan...

Rabu 22 Juli 2020, 14:27 WIB

Manfaatkan Wisma Hambalang, Minta Izin Jokowi

OLAHRAGA

Presiden (Joko Widodo) telah memberi arahan boleh digunakan, saya sudah koordinasi deng Menteri...

Senin 20 Juli 2020, 18:12 WIB

Polisi Temukan Ceceran Darah d Yodi Prabowo

MEGAPOLITAN

"Ceceran darah itu cuma ada di sekitar tubuh korban sendiri dengan kondisi tertelungkup pada saat...

Selasa 21 Juli 2020, 17:20 WIB

Para Suami di Toba lebih Gemar Ketimbang Turun ke Sawah

NUSANTARA

"Saya lihat disini kalau bapak-bapak kebanyakan duduk di lapo daripada ke sawah membantu sang...

Jumat 24 Juli 2020, 22:33 WIB

Selengkapnya

Berita Weekend

Ketahui Cara Tepat Mengenakan

Sebaiknya jangan sering menyentuh dan melepas pasang...

Jumat 24 Juli 2020, 22:22 WIB

Pandemi, Penjualan Sepeda di Sh Kali Lipat

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat minat tinggi masyarakat untuk membeli sepeda di...

Jumat 24 Juli 2020, 19:08 WIB

Kiat Menangani Barang-Barang

Sesekali, kita perlu ke luar rumah untuk berbelanja kebutuhan konsumsi untuk...

Jumat 24 Juli 2020, 19:01 WIB

Tips Sehat Berbelanja di Masa Pe

Jika Anda terpaksa berbelanja ke supermarke atau pasar, berikut sejumlah tips yang bisa diaplikasikan...

Jumat 24 Juli 2020, 18:43 WIB

Selengkapnya